BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penganggaran yang ideal melibatkan tahapan yang cukup kompleks, dimulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran dan realisasinya. Seluruh proses ini harus dilaksanakan dengan optimal, mematuhi peraturan yang berlaku, serta disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2013 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/Lembaga serta PMK No.49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran 2024, Dalam penyusunan anggaran perjalanan dinas, perlu diperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku, tata kelola administratif, tenggat waktu, fasilitas yang digunakan, pembiayaan, serta laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan kepada instansi terkait sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tujuan dari penganggaran perjalanan dinas harus direncanakan secara cermat, sesuai dengan kebutuhan internal instansi dan kepentingan masyarakat, agar hasilnya dapat memberikan kontribusi positif dan berdampak luas bagi publik. Regulasi ini menjadi fondasi utama dalam mendorong reformasi sistem pengelolaan anggaran negara yang terus mengalami penyesuaian dan penyempurnaan seiring dengan berkembangnya

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

dinamika dan kompleksitas manajemen sektor publik di era modern (Kementerian Keuangan RI, 2013; Jaelani, 2015).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V di bawah naungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Sumatera, yang mencakup kegiatan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur guna mendukung keberlanjutan lingkungan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Balai ini wajib menjalin koordinasi dengan kantor pusat Kementerian PUPR dan unit pelaksana lain di daerah agar pelaksanaan tugas dan wewenangnya tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional. Dalam pelaksanaannya, penyusunan anggaran perjalanan dinas harus dilakukan secara cermat, efisien, dan berdasarkan kebutuhan riil kegiatan, dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran 2024, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR.

Sebelum melaksanakan perjalanan dinas, pegawai atau pejabat teknis Balai harus berkoordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian guna penerbitan dokumen resmi seperti Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), serta memperoleh persetujuan dari pimpinan Balai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kewenangan dan Tugas Balai Wilayah Sungai.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Selama kegiatan, setiap pelaksana wajib menyusun laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas, disertai dokumen pendukung seperti SPT dan SPPD yang telah ditandatangani oleh instansi tujuan, bukti transaksi transportasi, penginapan, dan lainnya. Semua dokumen ini wajib diserahkan ke bagian keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan selesai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR dan aturan internal Ditjen SDA tentang pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses verifikasi, penginputan laporan, dan pencairan dana, agar tidak menghambat jadwal kerja dan pelaksanaan program strategis.

Namun dalam praktiknya, sering terjadi keterlambatan penyerahan dokumen dari beberapa pegawai dengan alasan tertentu, yang berdampak pada keterlambatan penginputan laporan dan pengembalian biaya. Hal ini mengganggu efisiensi dan efektivitas kegiatan serta memengaruhi penyerapan anggaran tahunan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan judul yaitu : ***"Mekanisme Penganggaran Perjalanan Dinas di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air".***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penganggaran perjalanan dinas di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam penyerahan surat pertanggungjawaban dan laporan perjalanan dinas oleh pegawai Balai Wilayah Sungai Sumatera V?

1.3 Tujuan Penulisan

Magang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Tujuan dari kegiatan magang ini yaitu:

1. Menganalisis dan menggambarkan mekanisme penganggaran perjalanan dinas di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera V.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kendala dalam penyerahan dokumen pertanggungjawaban dan laporan perjalanan dinas oleh pegawai.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain :

A. Bagi Penulis

1. Mendapatkan pengalaman langsung mengenai situasi dan dinamika dunia kerja di instansi pemerintahan teknis.
2. Menambah wawasan dan keterampilan yang relevan untuk bekerja di bidang administrasi pemerintahan, khususnya sektor sumber daya air.
3. Menerapkan teori dan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam praktik kerja nyata.
4. Memahami secara langsung mekanisme penganggaran perjalanan dinas di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
5. Mengenal berbagai aktivitas kelembagaan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan dinas, termasuk prosedur administratif, teknis, dan pelaporan.
6. Mengetahui penyebab dan solusi atas permasalahan yang sering terjadi di lapangan, seperti keterlambatan dalam penyerahan surat pertanggungjawaban oleh pegawai setelah melaksanakan perjalanan dinas.

B. Bagi Tempat Magang

1. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan antara Balai Wilayah Sungai Sumatera V dengan Universitas Andalas

2. Memberikan tambahan sumber daya pendukung dari mahasiswa/i magang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas administrasi maupun teknis yang relevan.

C. Bagi Pembaca

Laporan magang ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai proses kerja di instansi pemerintahan, khususnya dalam hal mekanisme penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas serta tantangan-tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya dalam pengelolaan kegiatan perjalanan dinas di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan Magang ini dilaksanakan di kantor Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang yang bertempat di Jl. Khatib Sulaiman No.86A, Ulak Karang Sel., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaksanaan waktu magang dilakukan selama 40 hari kerja pada tanggal 13 bulan Januari sampai 11 Maret tahun 2025.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan : dengan cara membaca dan mempelajari buku yang berbungan dengan topik pembahasan sehingga penulis bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

2. Penelitian lapangan : dilakukan secara langsung oleh penulis pada perusahaan /badan yang akan menjadi objek studi sehingga dapat diperoleh data-data yang akan diperlukan.
3. Pencarian data melalui internet : dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan magang ini dibagi menjadi beberapa bab yang membentuk satu kesatuan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini menjelaskan secara singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, metode penelitian data, serta sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teori

Pada Bab ini membahas tentang landasan teori mengenai mekanisme penganggaran perjalanan dinas dilingkup Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

BAB III : Gambaran Umum Instansi

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah dan perkembangan instansi, visi dan misi, gambaran umum instansi Kementerian PUPR Direktorat Jenderal

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V, struktur organisasi, dan tugas dari masing-masing bidang kerja instansi.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini, penulis akan membahas mekanisme penganggaran perjalanan dinas dilingkup Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

BAB V : Penutup

Pada bab ini, penulis mengambil kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai pelajaran atau masukan yang di tuangkan kedalam kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA